

**EFEKTIVITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
KEKERINGAN DI KECAMATAN LHOKNGA
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MIKYAL MUNAWWARAH

NIM. 210802018

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Mikyal Munawwarah
NIM	: 210802018
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir	: Lamihom, 25 Oktober 2003
Alamat	: Meunasah Moncut, Kecamatan Lhoknga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 April 2025
Yang Mengatakan,



Mikyal Munawwarah
NIM. 210802018

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**EFEKTIVITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEKERINGAN DI
KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

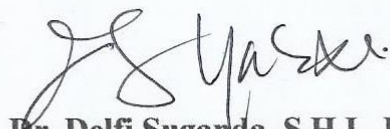
MIKYAL MUNAWWARAH

NIM. 210802018

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing,



Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M

NIP. 198611122015031005

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH
EFEKTIVITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEKERINGAN DI
KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR

SKRIPSI

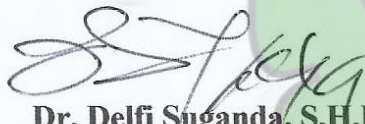
MIKYAL MUNAWWARAH
NIM. 210802018

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 21 April 2025

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

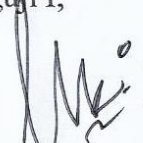
Ketua


Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP. 198611122015031005

Sekretaris,


Evi Yusnaini, S.AP.
NIP.

Penguji I,


Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 197802032005041001

Penguji II,


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIP. 199011192022031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

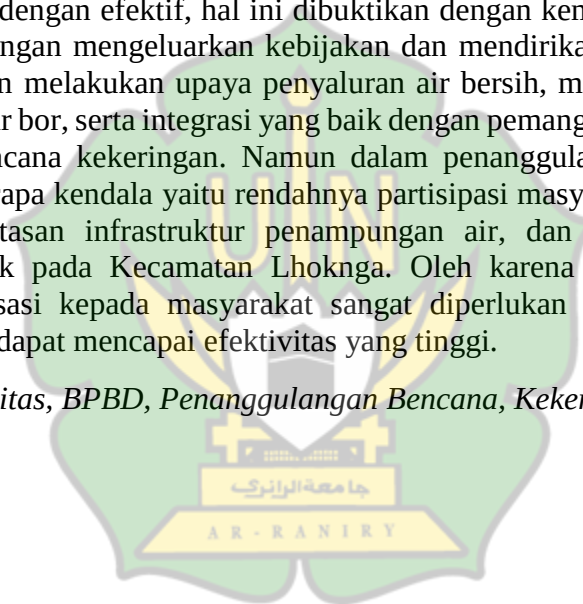


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Kekeringan di Kecamatan Lhoknga terjadi karena curah hujan yang rendah dan karakteristik geologi daerah karst di Lhoknga membuat ketersediaan air tanah sangat bergantung pada curah hujan. Selain itu, perubahan tutupan lahan di zona resapan juga mengurangi kapasitas penyerapan air di daerah tersebut, memperburuk dampak kekeringan. Bencana kekeringan bukanlah hal yang baru pada Kecamatan Lhoknga, pada tahun 2019 dan 2020 sudah pernah terjadi bencana kekeringan dan pada tahun 2024 bencana kekeringan kembali terjadi dan pada tahun ini merupakan tahun sangat parah bencana kekeringan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas BPBD dalam penanggulangan bencana kekeringan di Kecamatan Lhoknga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD Kabupaten Aceh Besar telah berjalan dengan efektif, hal ini dibuktikan dengan kemampuan adaptasi dan respon yang baik dengan mengeluarkan kebijakan dan mendirikan posko, menetapkan tujuan yang jelas dan melakukan upaya penyaluran air bersih, memberikan sosialisasi, dan pembuatan sumur bor, serta integrasi yang baik dengan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana kekeringan. Namun dalam penanggulangan tersebut BPBD masih terdapat beberapa kendala yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, keterbatasan infrastruktur penampungan air, dan belum terealisasinya pembangunan waduk pada Kecamatan Lhoknga. Oleh karena itu, koordinasi antar instansi dan sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan agar penanggulangan bencana kekeringan dapat mencapai efektivitas yang tinggi.

Kata Kunci: *Efektivitas, BPBD, Penanggulangan Bencana, Kekeringan.*



KATA PENGANTAR

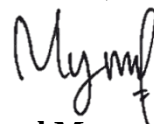
Alhamdulillah penulis sangat bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayat-nya. Shalawat dan Salam penulis sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul: **“Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kekeringan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, M.P.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Siti Nur Zalikha, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, masukan dan motivasi dalam pembuatan tugas akhir ini.
6. Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah membimbing, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan ini.
9. Kedua orang tua, kakak, dan adik tersayang terima kasih atas doa, nasehat dan bimbingannya, serta kasih sayang yang selalu diberikan.
10. Sahabat tercinta saya Cut Putri Alya Zulfa, Intan Nabila, Siti Khadijah, dan Nabilla Febridha terimakasih atas kebersamaan, motivasi, dan semangat yang selalu kalian berikan.

Banda Aceh, 23 April 2025

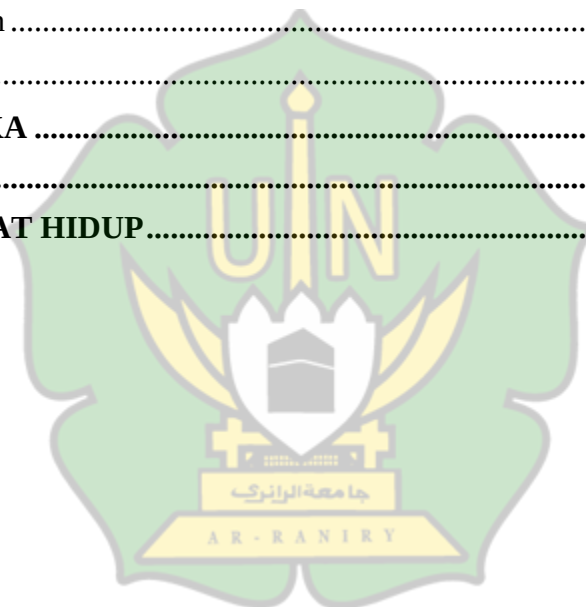


Mikyal Munawwarah
NIM. 210802018

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.2.1 Teori Efektivitas	10
2.2.2 Teori Peran Organisasi	13
2.2.3 Konsep Penanggulangan Bencana.....	15
2.2.4 Definisi Bencana Kekeringan	18
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Berpikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Fokus Penelitian.....	25
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.4 Sumber Data	26
3.5 Informan Penelitian.....	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	28

3.7	Teknik keabsahan Data	29
3.8	Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		31
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
4.1.1.	Kecamatan Lhoknga	31
4.1.2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar .	33
4.2	Hasil dan Pembahasan	38
4.2.1	Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar Dalam Penanggulangan Bencana Kekeringan di Kecamatan Lhoknga	38
BAB V PENUTUP		72
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN		78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		85



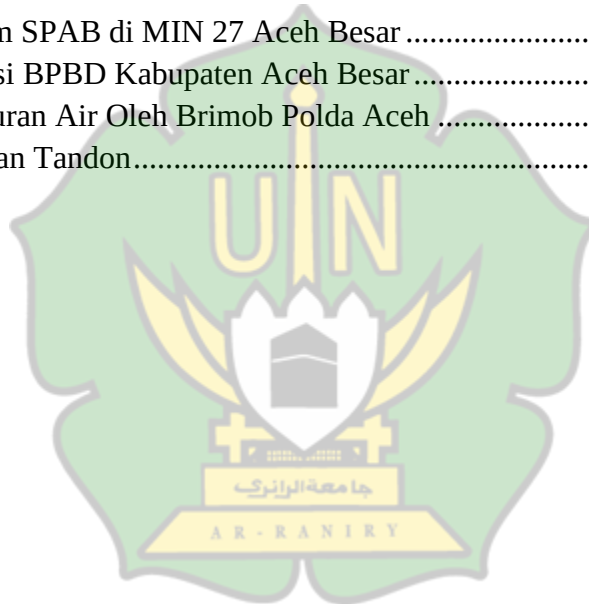
DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian	26
Tabel 3. 2 Informan Penelitian	27
Tabel 4. 1 Profil Kecamatan Lhoknga.....	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bencana di Aceh Tahun 2024.....	2
Gambar 1. 2 Peta Prakiraan Curah Hujan.....	3
Gambar 1. 3 Jumlah Jiwa Terpapar Bencana di Aceh Besar.....	4
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	24
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Aceh Besar.....	38
Gambar 4. 2 Posko Siaga Darurat Bencana Kekeringan	42
Gambar 4. 3 Peta Titik Penyaluran Air Bersih.....	44
Gambar 4. 4 Grafik Distribusi Air Bersih	45
Gambar 4. 5 Rilis Hari Tanpa Hujan (HTH).....	47
Gambar 4. 6 Penyaluran Air Bersih.....	51
Gambar 4. 7 Program SPAB di MIN 27 Aceh Besar	56
Gambar 4. 8 Integrasi BPBD Kabupaten Aceh Besar	62
Gambar 4. 9 Penyaluran Air Oleh Brimob Polda Aceh	67
Gambar 4. 10 Bantuan Tandon.....	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Penelitian.....	78
Lampiran 2 Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry.....	81
Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian.....	82
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bencana merupakan gangguan serius terhadap kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerugian sosial, material, dan lingkungan yang luas, melebihi kemampuan masyarakat yang terdampak untuk menanggulangi dengan sumber daya yang dimiliki.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa bencana didefinisikan sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun manusia, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.²

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur berbagai aspek penanganan bencana, termasuk upaya penanganan, pencegahan, peringatan dini, tanggap darurat, perbaikan, mitigasi bahaya dan gangguan, pemulihan, serta langkah-langkah untuk meminimalkan risiko. Undang-undang ini juga mencakup bantuan kepada korban, pengaturan kondisi darurat, proses evakuasi, dan koordinasi dengan instansi terkait penanganan bencana.³

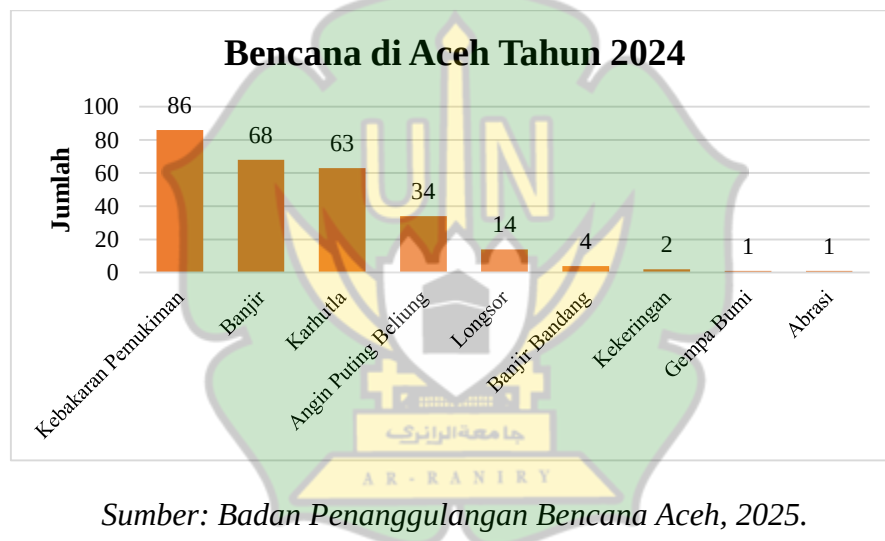
¹ Merintha Suryapusita et al., “Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Kekeringan Di Kabupaten Bojonegoro,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 9, no. 3 (2022): 3–11.

² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana” (2007).

³ Fetria Septiarum, Maesaroh, and Nina Widowati, “Manajemen Mitigasi Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Kekeringan Di Kabupaten Boyolali,” *Jurnal Kebijakan Publik Dan Tinjauan Manajemen* 12, no. 3 (2023): 1–14.

Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana, hal ini disebabkan oleh letak geografisnya yang berada pada pertemuan lempeng tektonik, berada di cincin Api Pasifik, dan berada di wilayah tropis. Oleh karena itu, negara Indonesia sering dilanda bencana seperti gempa bumi, banjir, longsor, kekeringan dan lain sebagainya. Salah satu provinsi yang banyak terjadi bencana adalah Provinsi Aceh, yang dimana pada tahun 2023 tercatat sebanyak 418 kejadian bencana dan pada tahun 2024 jumlah tersebut menurun menjadi 273 bencana.

Gambar 1. 1 Bencana di Aceh Tahun 2024



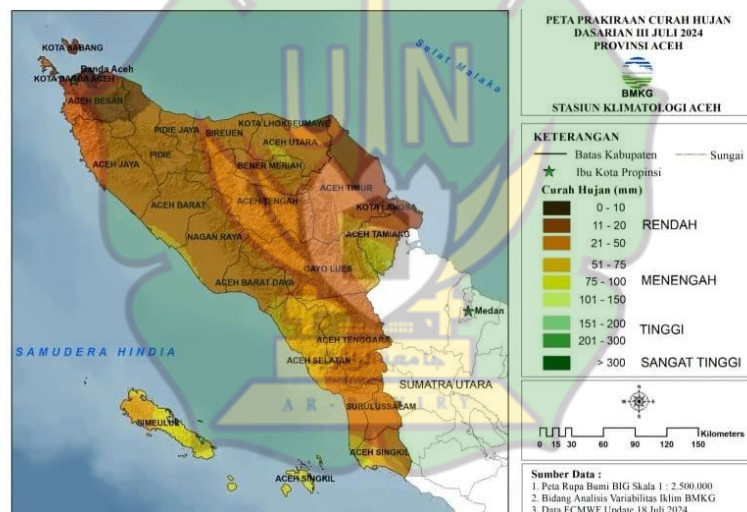
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2025.

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 Provinsi Aceh mengalami 273 kejadian bencana. Bencana tersebut mengakibatkan 12 orang meninggal dunia, 4 orang luka-luka, dan bencana tersebut berdampak pada 44.641 Kartu Keluarga (KK) atau 159.141 jiwa, serta jumlah pengungsi mencapai 4.144 orang. Sementara itu, total kerugian akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai Rp. 123 Miliar. BPBA mencatat bencana yang mendominasi Provinsi Aceh adalah bencana kebakaran pemukiman sebanyak 86 kali, kemudian bencana banjir yang terjadi sebanyak 68 kali, kebakaran hutan dan lahan sebanyak 63 kali, angin puting beliung 34 kali, longsor

sebanyak 14 kali, banjir bandang 4 kali, kekeringan sebanyak 2 kali, gempa bumi dan abrasi sebanyak 1 kali.⁴

Salah satu bencana alam yang memberikan dampak buruk yang signifikan bagi masyarakat adalah kekeringan. Bencana kekeringan merupakan suatu kondisi ketika ketersediaan air suatu wilayah berada di bawah tingkat yang dibutuhkan, baik untuk kebutuhan manusia, pertanian, lingkungan, maupun industri. Kekeringan dapat disebabkan oleh perubahan iklim atau rendahnya curah hujan, yang mengakibatkan kurangnya pasokan air di suatu wilayah dalam jangka waktu yang berkepanjangan.

Gambar 1. 2 Peta Prakiraan Curah Hujan



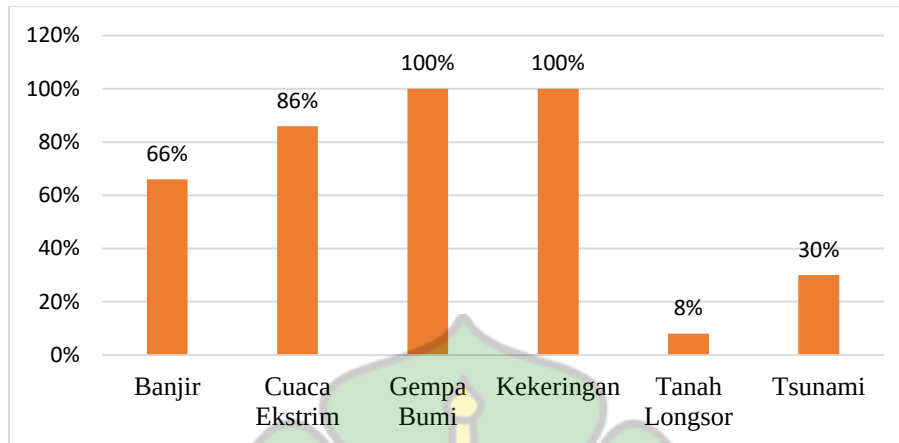
Sumber: Antara/HO-Stasiun Klimatologi Aceh, 2024.

Pada gambar diatas, dapat dilihat hampir seluruh wilayah Aceh mengalami curah hujan rendah. Daerah yang mengalami curah hujan yang rendah meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, dan Aceh Utara. Sementara daerah dengan curah hujan tinggi, meliputi

⁴ Badan Penanggulangan Bencana Aceh, “Tahun 2024 Aceh Dilanda 273 Bencana Dengan Kerugian Rp 123 Miliar Rupiah,” bpba.acehprov.go.id/, 2025, <https://bpba.acehprov.go.id/berita/kategori/bencana/tahun-2024-aceh-dilanda-273-bencana-dengan-kerugian-rp-123-miliar-rupiah>.

wilayah Pidie, Aceh Barat, sebagian besar Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh tenggara dan Aceh Singkil.⁵

Gambar 1. 3 Jumlah Jiwa Terdampak Bencana di Aceh Besar



Sumber: Inarisk BNPB, 2024.

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat jumlah jiwa terdampak bencana kekeringan di Aceh Besar sebanyak 100% pada tahun 2024, yang dimana ini menjadi salah satu prioritas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menanggulangi bencana ini. BNPB menetapkan prioritas agar menguatkan aturan daerah tentang pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan untuk pengurangan risiko bencana kekeringan. Serta, penguatan sistem peringatan dini bencana kekeringan daerah agar masyarakat bisa mengantisipasinya dan penguatan mekanisme pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana.⁶

Kekeringan bisa terjadi dimana saja, termasuk daerah Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Wilayah Lhoknga sangat rentan terhadap kekeringan karena berbagai faktor, termasuk curah hujan yang rendah dan pola hujan yang tidak merata. Kemudian,

⁵ Rahmat Fajri, "Aceh Berpotensi Kekeringan Akibat Curah Hujan Rendah Hingga September," *antaranews.com*, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4217095/aceh-berpotensi-kekeringan-akibat-curah-hujan-rendah-hingga-september>.

⁶ BNPB, "Indeks Risiko Bencana Aceh Besar," *inarisk.bnpb.go.id*, 2024, <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi>.

karakteristik geologi daerah karst atau daerah yang terdiri atas batuan kapur berpori yang membuat ketersediaan air tanah sangat bergantung pada curah hujan. Selain itu, perubahan tutupan lahan di zona resapan juga mengurangi kapasitas penyerapan air di daerah tersebut, memperburuk dampak kekeringan.⁷

Kekeringan di Kecamatan Lhoknga ini bukan hal yang baru dan sudah menjadi masalah yang berulang. Pada tahun 2019 dan 2020 wilayah ini juga mengalami kekeringan yang mengharuskan Pemerintah menyuplai air ke desa-desa yang terdampak. Kemudian, pada tahun 2024 Lhoknga kembali dilanda bencana kekeringan yang lebih parah. Kekeringan ini telah berlangsung sejak Juni 2024 dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan untuk mengkoordinasikan penanganan yang lebih komprehensif.⁸

Dampak dari kekeringan ini sangat dirasakan oleh lebih dari 15 ribu penduduk di Kecamatan Lhoknga yang mengalami krisis air bersih. Selain itu, kadar air pada saat kekeringan ini tidak layak dikonsumsi karena mengandung kadar besi yang tinggi.⁹ Akibatnya, masyarakat setempat hanya bisa mengandalkan pasokan air yang disuplai oleh Pemerintah dan instansi terkait. Kondisi ini terjadi karena belum adanya infrastruktur sumber air bersih, seperti belum adanya PDAM atau waduk dan kesehariannya masyarakat hanya mengandalkan air sumur atau air tanah saja.¹⁰

⁷ M Ifdhal, "Curah Hujan Rendah, Lhoknga Aceh Dilanda Kekeringan," *antaranews.com*, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4113273/curah-hujan-rendah-lhoknga-aceh-dilanda-kekeringan>.

⁸ Agus Setyadi, "Lhoknga Krisis Air: Pemkab Aceh Besar Tetapkan Siaga Darurat Bencana Kekeringan," *Detiksumut*, 2024, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7430451/lhoknga-krisis-air-pemkab-aceh-besar-tetapkan-siaga-darurat-bencana-kekeringan>.

⁹ Taufan Mustafa, "Sudah 5 Bulan Bencana Kekeringan Ekstrem Mendera Warga Lhoknga Aceh Besar," *Sindonews.com*, 2024, <https://daerah.sindonews.com/read/1417467/174/sudah-5-bulan-bencana-kekeringan-ekstrem-mendera-warga-lhoknga-aceh-besar-1721210873>.

¹⁰ Julinar Nora Novianti, "Air Sumur Berminyak Dan Bau, Warga Naga Umbang Dalam Pusaran Krisis Air Bersih," *habaaceh.id*, 2024, <https://www.habaaceh.id/news/air-sumur-berminyak-dan-bau-warga-naga-umbang-dalam-pusaran-krisis-air-bersih/index.html>.

Selanjutnya, infrastruktur pada lahan pertanian juga belum memadai, seperti belum adanya irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada musim kemarau. Jadi pada saat kekeringan melanda daerah Lhoknga, banyak petani yang mengalami gagal panen. Selain itu, keringan ini juga berdampak pada pelaku usaha, seperti rumah makan, *laundry* baju, dan usaha lainnya yang banyak menggunakan air. Ketika ketersediaan air bersih terbatas, usaha operasional pelaku usaha tersebut terganggu yang menyebabkan penurunan pendapatan dan kehilangan lapangan kerja.

Di tahun 2021 pembangunan waduk sudah pernah direncanakan, namun karena adanya wabah covid-19, anggaran untuk pembangunan tersebut dialihkan untuk penanganan wabah covid-19, yang menjadi prioritas utama Pemerintah saat itu. Setelah situasi mulai membaik, bupati yang baru terpilih mengeluarkan janji untuk melanjutkan pembangunan waduk dan irigasi. Janji ini memberikan harapan baru bagi masyarakat, terutama dalam konteks ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air. Namun, hingga saat ini, perkembangan nyata dari program tersebut masih belum terlihat. Masyarakat mulai mempertanyakan komitmen pemerintah dalam merealisasikan janji tersebut, mengingat pentingnya infrastruktur air untuk mendukung pertanian dan mengatasi masalah kekeringan yang sering terjadi di daerah tersebut.

Kekeringan di Lhoknga tidak dapat dikategorikan sebagai kekeringan tahunan karena intensitas dan durasi kejadiannya tidak terjadi secara konsisten setiap tahun. Kemudian, kekeringan di Lhoknga ini tidak dapat diprediksi dengan jelas dan akurat, meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Aceh telah melakukan prediksi cuaca secara berkala. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi kondisi iklim setempat, termasuk perubahan iklim global, variabilitas

cuaca ekstrem, serta karakteristik geografis dan topografis wilayah Lhoknga yang berdekatan dengan pesisir.

Bencana kekeringan di Lhoknga merupakan isu yang serius, terutama pada tahun 2024 yang dimana tercatat 100% jiwa yang berdampak pada kekeringan di Aceh Besar. Fenomena ini menunjukkan betapa rentannya daerah tersebut terhadap bencana alam, sehingga memerlukan perhatian lebih dan tindakan segera dari berbagai pihak, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar. BPBD memiliki peran sangat penting dalam merespons situasi ini, dengan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif dan berkelanjutan.

BPBD merupakan lembaga yang sangat penting dalam penanggulangan bencana karena lembaga ini menjadi ujung tombak Pemerintah Daerah dalam melaksanakan manajemen bencana. BPBD mempunyai fungsi sebagai perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan pengkoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Oleh karena itu, penanggulangan kekeringan di Lhoknga harus bisa segera diselesaikan dan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi sangat penting.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam mengenai “Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kekeringan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar”. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas BPBD Kabupaten Aceh Besar dalam penanggulangan bencana kekeringan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana tersebut di Kecamatan Lhoknga.

1.2 Identifikasi Masalah

- 1.2.1. Daerah Lhoknga memiliki karakteristik geologi daerah karst atau daerah yang terdiri atas batuan kapur berpori yang membuat ketersediaan air tanah sangat bergantung pada curah hujan.
- 1.2.2. Infrastruktur untuk menghadapi kekeringan di Kecamatan Lhoknga belum memadai, baik dalam hal sistem irigasi, sumber air alternatif dan sarana distribusi air bersih.
- 1.2.3. Bencana kekeringan di Kecamatan Lhoknga ini berdampak pada ketersediaan air untuk rumah tangga, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1.3.1. Bagaimana efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana kekeringan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1.4.1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam Penanggulangan bencana kekeringan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.5.1. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanggulangan bencana kekeringan serta peran BPBD dalam upaya tersebut. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pengambilan kebijakan dalam menyusun strategi yang efektif untuk menangani bencana kekeringan.

1.5.2. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebijakan publik, serta memberikan wawasan baru tentang peran BPBD dalam penanggulangan bencana kekeringan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi akademisi dan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam mengkaji lebih mendalam tentang peran BPBD dalam penanggulangan bencana kekeringan di daerah lain.

